

## Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Studi pada Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)

Silvi Maulinda

<sup>123</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

[zukhruufii@gmail.com](mailto:zukhruufii@gmail.com),  
[itokwicaksono@unmuhjember.ac.id](mailto:itokwicaksono@unmuhjember.ac.id),  
[muhammadzefrikudus@gmail.com](mailto:muhammadzefrikudus@gmail.com)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur kelurahan merupakan elemen krusial dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan proses pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hadir dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun faktor yang memengaruhi partisipasi antara lain tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kepemimpinan lokal, serta kualitas komunikasi antara pemerintah kelurahan dan warga.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Kelurahan, Pembangunan Partisipatif

### ABSTRACT

*Urban infrastructure development is a crucial aspect of improving community quality of life. Active public participation plays a key role in ensuring the success of infrastructure programs at the local level. This study aims to analyze the forms of community participation and identify the influencing factors in Kelurahan Jogosari, Pandaan District, Pasuruan Regency. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings show that community participation occurs in the planning, implementation, and evaluation stages of infrastructure development. Factors influencing participation include education level, economic conditions, local leadership, and the quality of communication between the local government and residents.*

**Keywords:** Community Participation, Infrastructure Development, Urban Village, Participatory Development

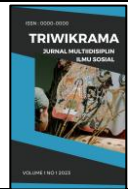
### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat kelurahan, pembangunan infrastruktur menjadi semakin penting karena langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Konsep pembangunan partisipatif telah menjadi paradigma baru dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [zukhruufii@gmail.com](mailto:zukhruufii@gmail.com)



Wilayah RW 02 Kelurahan Jogosari yang terletak di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, merupakan salah satu kelurahan yang telah mengimplementasikan konsep pembangunan partisipatif dalam program-program pembangunan infrastrukturnya. Sebagai kelurahan yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya, Kelurahan Jogosari menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji terkait implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Beberapa program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Kelurahan Jogosari meliputi pavingisasi, pembangunan tandon air, pemeliharaan balai RW. Program-program tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari kontribusi tenaga, material, hingga dana. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan tidaklah sama, hal ini dipengaruhi oleh kondisi seperti kepercayaan terhadap pemerintah, pengalaman sebelumnya dalam kegiatan pembangunan, serta ketersediaan waktu dan sumber daya dari warga. Padahal secara normatif, kebijakan pembangunan nasional dan peraturan daerah telah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Ketimpangan antara idealisme kebijakan dengan praktik partisipasi di lapangan ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks implementasi pembangunan di tingkat kelurahan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur kelurahan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Meskipun teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi dapat terjadi dalam empat tahap utama—yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi namun dalam praktiknya, belum banyak kajian yang menganalisis secara menyeluruh bagaimana bentuk dan intensitas partisipasi masyarakat dalam keempat tahap tersebut, khususnya di tingkat kelurahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan teoritis antara kerangka ideal yang ditawarkan oleh Cohen dan Uphoff dengan kondisi empiris yang sering kali menunjukkan bahwa partisipasi hanya dominan pada tahap pelaksanaan, sementara tahap lainnya cenderung terabaikan.

Oleh karena itu, teori partisipasi yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini untuk memahami secara komprehensif dimensi-dimensi partisipasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi pembangunan. Kerangka teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat kelurahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Studi pada Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan).”** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memperkaya kajian partisipasi pembangunan berbasis komunitas, khususnya dalam konteks pemerintahan lokal.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Adminitrasi Publik**

Administrasi publik merupakan bagian penting dari proses pemerintahan yang berperan dalam menerjemahkan kebijakan politik ke dalam tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Shafritz dan Russell (1999) memandang administrasi publik sebagai sebuah disiplin yang tidak hanya berfokus pada manajemen program-program publik, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, analisis kebijakan, serta implementasi dari kebijakan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa *“public administration is the management of public programs; the translation of politics into the reality that citizens see every day”* (Shafritz & Russell, 1999, hlm. 1). Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa administrasi publik bertugas mengubah keputusan

politik menjadi pelayanan publik yang konkret dan operasional. . Oleh karena itu, Shafritz & Russel (1999:5-28) mengembangkan pemahaman terhadap administrasi publik dalam empat kategorisasi atau perspektif yang meliputi: *political, legal, managerial, dan occupational perspective*, seperti pada Tabel *Category of the Definition of Public Administration*

| No | Perspective         | Definitions of Publik Administration                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Political</i>    | <i>As what government does?; Both direct and indirect; A phase in the publik policy; Implementing the publik interest; and Doing collectively that which cannot be so well done.</i> |
| 2  | <i>Legal</i>        | <i>As law in action; Regulation; The King's largesse; and Theft</i>                                                                                                                  |
| 3  | <i>Managerial</i>   | <i>As the executive function in government; Management specialty; Mickey mouse; Art, not science-or-Vice versa.</i>                                                                  |
| 4  | <i>Occupational</i> | <i>As an occupational category; An essay contest; Idealism in action; An academic field; and a profession.</i>                                                                       |

Sumber: Shafritz & Russel (1999:5-30)

### **Manajemen Pelayanan Publik**

Manajemen Pelayanan Publik merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau organisasi publik, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks administrasi publik, manajemen pelayanan publik tidak hanya menyangkut aspek teknis penyediaan layanan, tetapi juga mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Menurut Osborne dan Gaebler (1992), manajemen pelayanan publik harus bertransformasi dari model birokrasi tradisional yang kaku menjadi model kewirausahaan publik (entrepreneurial government) yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil. Mereka menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam manajemen pelayanan, dengan melibatkan masyarakat sebagai pelanggan utama layanan publik. Sementara itu, **Dwiyanto (2006)** menjelaskan bahwa manajemen pelayanan publik adalah suatu pendekatan yang mengutamakan orientasi pada kepuasan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan sosial. Kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh aspek kecepatan dan ketepatan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasakan adanya penghargaan dan perhatian dalam proses pelayanan.

#### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dalam empat bentuk utama: partisipasi pada pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Keempat bentuk ini menggambarkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dan sistematis dalam proses pembangunan. Dengan adanya partisipasi, pembangunan menjadi lebih kontekstual, sesuai kebutuhan lokal, dan berkelanjutan karena lahir dari aspirasi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan literatur yang ada, partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk:

## 1. Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi dalam perencanaan meliputi keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan prioritas, dan merumuskan program-program pembangunan. Bentuk partisipasi ini sangat penting karena masyarakat yang paling mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi di wilayah mereka.

## 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan dapat berupa kontribusi tenaga, material, dana, atau keahlian dalam implementasi program pembangunan. Bentuk partisipasi ini sering disebut sebagai gotong royong atau swadaya masyarakat.

## 3. Partisipasi dalam Pemanfaatan

Partisipasi dalam pemanfaatan berkaitan dengan penggunaan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat. Partisipasi ini penting untuk memastikan sustainabilitas program pembangunan.

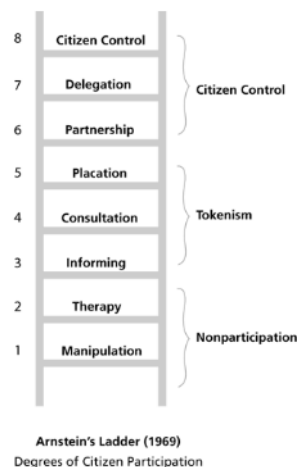
## 4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi pada tahap evaluasi meliputi keterlibatan masyarakat pada saat menilai keberhasilan program pembangunan dan memberikan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang.

### **Tangga Partisipasi Terbuka**

Arnstein (1969) mengembangkan "Ladder of Participation" yang mengklasifikasikan partisipasi menjadi delapan tingkatan:

Gambar Tangga Partisipasi Terbuka



Sumber: Arnstein (1969)

Delapan tangga partisipasi yang dikemukakan Sherry R. Arnstein dalam artikelnya "*A Ladder of Citizen Participation*" (1969) menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tangga ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya soal "ikut hadir", tetapi juga sejauh mana masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil.

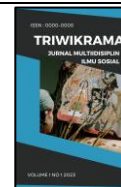
Berikut penjelasannya dari tingkat terendah hingga tertinggi:

### **1. Manipulation (Manipulasi)**

Masyarakat dilibatkan secara formal, tetapi sebenarnya hanya dijadikan alat untuk mendukung agenda pihak berwenang. Tidak ada kekuasaan nyata yang diberikan.

### **2. Therapy (Terapi)**

Partisipasi digunakan untuk "mendidik" atau "memperbaiki" masyarakat, seolah-olah mereka menjadi objek masalah yang harus diperbaiki, bukan sebagai pihak yang memiliki hak suara.



*(Kedua tingkat ini disebut “Non-participation” karena tidak memberikan kekuatan nyata kepada warga.)*

### **3. Informing (Memberi Informasi)**

Masyarakat diberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, atau rencana pemerintah. Informasi mengalir satu arah, sehingga warga tidak memiliki mekanisme untuk memberikan masukan.

### **4. Consultation (Konsultasi)**

Pemerintah meminta pendapat masyarakat melalui survei, rapat dengar pendapat, atau forum publik. Namun, masukan tersebut belum tentu berpengaruh pada keputusan akhir.

### **5. Placation (Penghiburan/Penentraman)**

Beberapa warga atau kelompok masyarakat diberi kesempatan duduk dalam dewan atau komite, tetapi kekuasaan pengambilan keputusan tetap berada di pihak otoritas.

*(Tingkat 3-5 ini disebut “Tokenism” karena memberikan kesan dilibatkan, tetapi pengaruh warga masih terbatas.)*

### **6. Partnership (Kemitraan)**

Masyarakat dan pemerintah berbagi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Ada mekanisme negosiasi, pembagian tanggung jawab, dan kolaborasi setara.

### **7. Delegated Power (Kekuasaan yang Didelegasikan)**

Warga atau perwakilannya memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menentukan keputusan akhir pada bidang tertentu. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator atau pendukung.

### **8. Citizen Control (Kendali Penuh oleh Warga)**

Masyarakat memiliki kendali penuh atas perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program. Keputusan sepenuhnya berada di tangan warga tanpa intervensi dominan dari pemerintah.

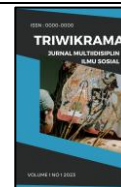
## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena Keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Menurut Yin (2014), studi kasus merupakan strategi yang tepat ketika penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas suatu fenomena kontemporer, di mana peneliti tidak memiliki kontrol langsung terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Dengan strategi ini, penelitian dapat menggali dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat secara utuh, termasuk proses interaksi antara warga, aparat kelurahan, dan pihak-pihak lain dalam pembangunan infrastruktur

### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti di lapangan atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

### **Pengumpulan Data**



Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*), dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Adapun beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*), dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Kemudian peneliti melakukan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui proses tanya jawab secara tatap muka. Kemudian peneliti menggunakan dokumentasi agar data lebih relevan dengan focus penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

### **Analisi Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Pendekatan ini menekankan pada proses yang berlangsung secara siklus, di mana peneliti terus bergerak antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan, sementara penyajian data membantu dalam mengorganisasi temuan sehingga lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan data yang telah diperoleh dan diolah, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendalam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat**

##### **Partisipasi dalam Perencanaan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari dapat diidentifikasi melalui beberapa mekanisme:

##### **1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Musrenbang dilaksanakan setiap tahun sebagai forum untuk menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Jogosari, tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang mencapai 65% dari total undangan.

*“Setiap tahun kami mengadakan Musrenbang untuk mendengar aspirasi masyarakat. Partisipasi cukup baik, sekitar 65% dari yang diundang hadir. Mereka aktif menyampaikan usulan-usulan pembangunan infrastruktur” (Wawancara 23 April 2025)*

##### **2. Rapat RT/RW**

Rapat RT/RW merupakan salah satu wadah musyawarah yang berada pada lingkup terdekat dengan masyarakat karena dilaksanakan pada tingkat lingkungan yang lebih kecil dan bersifat mikro. Forum ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun keluhan terkait kebutuhan infrastruktur di wilayah mereka secara langsung kepada pengurus lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 05, partisipasi masyarakat dalam rapat RT/RW tergolong tinggi dengan tingkat kehadiran mencapai 70-80%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga memiliki kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, meskipun masih ada sebagian kecil warga yang tidak hadir karena berbagai kendala seperti kesibukan pekerjaan

*“Di tingkat RT, partisipasi warga lebih baik karena masalah yang dibahas langsung menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Kalau ada jalan rusak atau got mampet, mereka langsung protes dan minta diperbaiki” (Wawancara 22 April 2025)*

### 3. Survei Aspirasi Masyarakat

Kelurahan Jogosari juga melakukan survei aspirasi masyarakat melalui kuesioner yang disebarakan kepada kepala keluarga. Survei ini bertujuan untuk mengetahui prioritas kebutuhan infrastruktur menurut masyarakat. Dengan Kuisisioner tersebut menghasilkan usulan sebagai berikut:

Gambar Usulan Pembangunan RW 02 Kelurahan Jogosari

| PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 - 2024 |                   |                                       |                                                                |           |                |                |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| KELURAHAN JOGOSARI KECAMATAN PANDAAN  |                   |                                       |                                                                |           |                |                |
| No                                    | Kode Rekening     | Sub Kegiatan                          | Spesifikasi                                                    | Volume    | Nominal        | Tahun Anggaran |
| 1                                     | 5.1.02.01.01.0039 | Pengerjaan Sumur Bor                  | Pengeboran 8" Cashing 6"                                       | 50 Meter  | Rp. 91.741.500 | 2023           |
| 2                                     | 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupeten         | 1 Titik Lampu Penerangan Jalan tinggi tiang 6 meter            | 5 Titik   | Rp. 51.412.675 | 2023           |
| 3                                     | 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya           | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 002                            | 100 Meter | Rp. 25.254.900 | 2023           |
| 4                                     | 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Gedung Sederhana | Gedung Sederhana                                               | 10 M2     | Rp. 9.791.200  | 2024           |
| 5                                     | 5.2.04.02.61.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih     | Bangunan Cor Beton, Tinggi Kaki 3 Meter, Volume Air 8000 Meter | 1 Unit    | Rp. 88.800.000 | 2024           |

Sumber: Berkas Sekretaris Kelurahan Jogosari

### Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Bentuk-bentuk partisipasi dalam pelaksanaan meliputi:

#### 1. Kontribusi Tenaga (Gotong Royong)

Gotong royong masih menjadi tradisi yang kuat di Kelurahan Jogosari. Berdasarkan observasi, kegiatan gotong royong untuk pembangunan infrastruktur melibatkan rata-rata 60-70% kepala keluarga dalam setiap kegiatan.

*“Tradisi gotong royong masih sangat kuat di sini. Kalau ada pembangunan jalan atau pembersihan saluran air, warga langsung turun tangan tanpa diminta. Mereka sudah sadar bahwa ini untuk kepentingan bersama” (Wawancara 21 April 2025)*

#### 2. Kontribusi Material

Masyarakat juga memberikan kontribusi dalam bentuk material seperti pasir, batu, semen, dan peralatan kerja. Berdasarkan data kelurahan, dalam program pembangunan jalan paving tahun 2023, masyarakat menyumbang material senilai Rp 150 juta atau sekitar 30% dari total biaya pembangunan.

#### 3. Kontribusi Dana

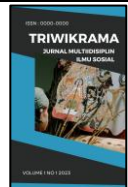
Kontribusi dana masyarakat biasanya dikumpulkan melalui iuran RT/RW atau sumbangan sukarela. Untuk program-program skala besar, masyarakat mampu mengumpulkan dana hingga Rp 50-100 juta.

#### 4. Kontribusi Keahlian

Beberapa warga yang memiliki keahlian khusus seperti tukang batu, tukang las, dan operator alat berat juga memberikan kontribusi keahlian mereka secara sukarela.

### Partisipasi dalam Pemanfaatan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun terlihat dari:



### 1. Penggunaan Infrastruktur Sesuai Fungsi

Masyarakat menggunakan infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan fungsinya. Observasi menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan infrastruktur mencapai 85-90%.

### 2. Pemeliharaan Infrastruktur

Masyarakat juga berpartisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur melalui kegiatan bersih-bersih rutin dan perbaikan kecil-kecilan.

### Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur dilakukan melalui:

#### 1. Rapat Evaluasi Tahunan

Kelurahan mengadakan rapat evaluasi tahunan untuk menilai keberhasilan program pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam rapat ini mencapai 55%.

#### 2. Pengaduan dan Saran

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan saran terkait infrastruktur melalui kotak saran yang disediakan di kantor kelurahan atau melalui grup WhatsApp kelurahan.

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

#### Faktor Internal

##### 1. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tingkat pendidikan masyarakat memiliki korelasi positif dengan tingkat partisipasi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam kegiatan perencanaan dan evaluasi.

*“Warga yang berpendidikan tinggi biasanya lebih kritis dan aktif dalam rapat-rapat perencanaan. Mereka bisa memberikan masukan yang konstruktif” (Wawancara 21 April 2025)*

##### 2. Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi masyarakat mempengaruhi bentuk partisipasi. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih baik cenderung memberikan kontribusi dana yang lebih besar, sementara masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah lebih banyak memberikan kontribusi tenaga.

##### 3. Usia

Faktor usia juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Masyarakat usia produktif (25-50 tahun) menunjukkan tingkat partisipasi yang paling tinggi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

##### 4. Motivasi dan Kesadaran

Motivasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur mempengaruhi tingkat partisipasi. Masyarakat yang memiliki motivasi tinggi akan lebih aktif berpartisipasi.

#### Faktor Eksternal

##### 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan lurah dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang transformasional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

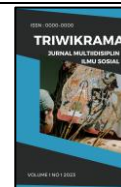
*“Pak Lurah sangat aktif dalam menggerakkan masyarakat. Beliau selalu turun langsung ke lapangan dan memberikan contoh yang baik” (Wawancara 20 April 2025)*

##### 2. Komunikasi

Sistem komunikasi yang baik antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi. Kelurahan Jogosari menggunakan berbagai media komunikasi seperti pengumuman di masjid, grup WhatsApp, dan papan pengumuman.

##### 3. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan program pembangunan infrastruktur mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan tingkat partisipasi. Kelurahan Jogosari menerapkan sistem transparansi melalui papan informasi dan laporan pertanggungjawaban.



#### 4. Tradisi dan Budaya

Tradisi gotong royong yang masih kuat di Kelurahan Jogosari menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

#### PEMBAHASAN

##### Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan. Keterlibatan warga dapat terjadi dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Bentuk partisipasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif maupun pasif dalam setiap proses yang berlangsung. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola partisipasi masyarakat di Kelurahan Jogosari, dilakukan analisis berdasarkan konsep Cohen dan Uphoff (1980) yang mengklasifikasikan partisipasi ke dalam empat bentuk, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Kelurahan Jogosari dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk sesuai dengan konsep Cohen dan Uphoff (1980), yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi.

Tabel Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

| No | Bentuk Partisipasi | Contoh Kegiatan                                                                                                                                               | Tingkat Partisipasi |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Perencanaan        | Musrenbang, rapat RT/RW, dan survei aspirasi warga terkait pembangunan pavingisasi jalan lingkungan RW 2, sumur bor, dan bangunan air bersih.                 | 65–80%              |
| 2  | Pelaksanaan        | Gotong royong membersihkan area pembangunan, membantu distribusi material ringan, kontribusi tenaga kerja saat pavingisasi dan pembuatan saluran air.         | 60–70%              |
| 3  | Pemanfaatan        | Pemakaian hasil pembangunan seperti jalan lingkungan yang sudah dipaving, pemanfaatan fasilitas sumur bor dan bangunan air bersih oleh masyarakat sekitar.    | 85–90%              |
| 4  | Evaluasi           | Rapat evaluasi pembangunan, penyampaian kritik/saran masyarakat tentang kualitas jalan, air bersih, dan pengaduan jika terjadi kerusakan atau kendala teknis. | 55%                 |

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Partisipasi dalam perencanaan menunjukkan tingkat yang cukup baik dengan berbagai mekanisme yang telah diterapkan seperti Musrenbang, rapat RT/RW, dan survei aspirasi. Namun, partisipasi dalam tahap evaluasi masih perlu ditingkatkan karena hanya mencapai 55%.

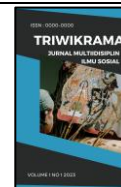
Partisipasi dalam pelaksanaan menunjukkan tingkat yang paling tinggi, terutama dalam bentuk gotong royong dan kontribusi material. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi gotong royong masih sangat kuat dalam masyarakat Kelurahan Jogosari.

##### Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam poses pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman

\*Corresponding author

E-mail addresses: [zukhrufii@gmail.com](mailto:zukhrufii@gmail.com)



langsung terkait permasalahan serta potensi di lingkungan mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein (1969, p. 216) dalam tulisannya *A Ladder of Citizen Participation*:

*“Citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future.”*

(“Partisipasi warga adalah istilah yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan kepada masyarakat. Ini merupakan redistribusi kekuasaan yang memungkinkan warga yang sebelumnya tidak memiliki akses dalam proses politik dan ekonomi, dapat dilibatkan secara sadar di masa mendatang.”)

Keterlibatan warga dalam proses pembangunan memastikan bahwa setiap usulan dan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan. Dengan menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, warga merasa memiliki ikatan emosional terhadap program yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Musrenbang sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dipengaruhi oleh sejauh mana warga terlibat secara aktif, kritis, dan konstruktif dalam forum ini. Partisipasi warga dalam forum ini bersifat aktif, di mana setiap usulan yang dianggap penting dan mendesak oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi, disampaikan secara langsung kepada pihak LPM. Hal ini sependapat dengan yang dikatakan Cohen & Uphoff (1980, p. 214) menjelaskan bahwa:

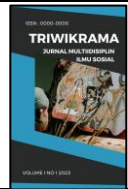
*“Participation includes people’s involvement in decision-making processes, in implementing programs, their sharing in the benefits of development, and their involvement in efforts to evaluate such programs.”*

(“Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pembagian manfaat pembangunan, serta keterlibatan mereka dalam evaluasi program tersebut.”)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jogosari, diketahui bahwa masyarakat, khususnya para Ketua RT dan RW, secara aktif hadir dalam forum pra-Musrenbang serta turut menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang dirasakan langsung di wilayah masing-masing. Tingkat keterlibatan yang cukup tinggi ini mencerminkan bahwa warga tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga telah mengambil peran sebagai subjek yang peduli dan berinisiatif dalam menentukan arah prioritas pembangunan kelurahan. Partisipasi masyarakat mencerminkan bagaimana kekuasaan dapat dibagi secara lebih adil antara pihak penyelenggara kegiatan dan kelompok penerima manfaat. Partisipasi ini memiliki tingkatan yang menunjukkan perbedaan dalam tingkat kewenangan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tingkatan tersebut dapat diilustrasikan seperti sebuah tangga dengan delapan tingkatan, yang menunjukkan peningkatan keterlibatan masyarakat secara bertahap dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1986 dalam Wicaksono, 2010). Dalam konteks yang dijelaskan, terdapat beberapa hubungan yang relevan dengan tingkatan partisipasi yang disebutkan:

#### 1. Tidak Ada Partisipasi (Manipulation, Therapy):

Pada kasus pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari, tidak ditemukan indikasi bahwa masyarakat berada pada tingkat *non-participation* seperti manipulation atau therapy. Masyarakat diberi ruang untuk terlibat meskipun tidak sepenuhnya dominan dalam pengambilan keputusan.



Artinya, warga tidak berada pada posisi hanya sebagai penerima keputusan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh pihak pemerintah.

## 2. Tokenisme (Informing, Consultation, Placation)

Sebagian besar partisipasi masyarakat di Kelurahan Jogosari berada pada tingkatan tokenisme, khususnya pada tahap informing dan consultation. Pada tahap perencanaan, pemerintah kelurahan memberikan informasi kepada masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) dan rapat RT/RW. Warga juga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi melalui survei kebutuhan. Namun, pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir relatif terbatas karena keputusan strategis masih didominasi oleh pihak pemerintah. Pada tahap evaluasi, masyarakat diundang untuk memberikan masukan dalam rapat evaluasi pembangunan, tetapi penyampaian kritik atau saran warga belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas untuk memenuhi prosedur.

## 3. Masyarakat Memiliki Kekuasaan (*Partnership, Delegated Power, Citizen Control*)

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat mulai menunjukkan peningkatan menuju tingkat *partnership*. Keterlibatan aktif warga melalui gotong royong, kontribusi tenaga kerja, dan sumbangan material mencerminkan adanya kerja sama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Namun, tingkat partisipasi ini belum sampai pada tahap *delegated power* atau *citizen control*, di mana masyarakat memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan arah pembangunan. Meski demikian, kesiapan dan antusiasme warga dalam berpartisipasi menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi ke level yang lebih tinggi di masa mendatang jika diberikan ruang dan kewenangan lebih besar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi partisipasi masyarakat di Kelurahan Jogosari secara umum masih berada pada tingkat **tokenism**, khususnya pada level *konsultasi* dan *placation* (penenangan). Meskipun masyarakat diundang untuk hadir dalam forum perencanaan atau mendengarkan paparan rencana pembangunan, namun daya tawar mereka terhadap pengambilan keputusan bersifat terbatas. Ruang untuk kemitraan sejati dan pengambilan keputusan bersama belum sepenuhnya terbuka. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi partisipasi yang tampak aktif secara kuantitas (versi Cohen & Uphoff) belum tentu menggambarkan kualitas partisipasi yang setara dan bermakna (versi Arnstein). Artinya, walaupun masyarakat dilibatkan secara fisik dalam pelaksanaan pembangunan, mereka belum sepenuhnya memiliki kendali atau kuasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur.

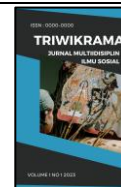
Temuan ini menunjukkan adanya *gap* antara semangat partisipatif yang diatur dalam kebijakan pembangunan kelurahan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Keterlibatan masyarakat cenderung bersifat prosedural, bukan substantif. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya perlu difokuskan pada jumlah keterlibatan, tetapi juga pada perluasan ruang dialog, penguatan kapasitas warga, dan distribusi kekuasaan yang lebih adil dalam proses pembangunan.

## Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kelurahan Jogosari sejalan dengan teori-teori yang ada. Faktor internal seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bentuk dan tingkat partisipasi.

Faktor eksternal seperti kepemimpinan, komunikasi, dan transparansi juga memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kepemimpinan lurah yang transformasional dan sistem komunikasi yang baik telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat.

## Efektivitas Partisipasi Masyarakat



Efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari dapat diukur dari beberapa indikator:

#### 1. Tingkat Keberhasilan Program

Tingkat keberhasilan program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari mencapai 85%, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi positif terhadap keberhasilan program.

Dari seluruh usulan masyarakat terdapat banyak usulan yang sudah direalisasikan sisanya merupakan pembangunan berskala besar yang diajukan pada Musrenbang Kecamatan.

#### 2. Sustainability Program

Infrastruktur yang dibangun dengan partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat sustainability yang tinggi karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk memelihara.

#### 3. Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil survei kepuasan yang dilakukan, tercatat bahwa 78% masyarakat merasa puas dengan hasil pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari. Kepuasan ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan melalui musyawarah dan rapat RT/RW, hingga pelaksanaan yang melibatkan gotong royong dan kontribusi material. Partisipasi tersebut membuat masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan, sehingga muncul kesadaran untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada. Namun demikian, sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya puas menyampaikan harapan agar pemerintah lebih responsif dalam tahap evaluasi, terutama dalam menangani keluhan dan perbaikan fasilitas.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan turut mempengaruhi tingkat kepuasan mereka terhadap hasil yang telah dicapai.

### 4. SIMPULAN DAN SARAN

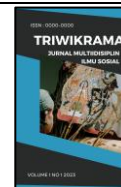
#### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Jogosari terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain partisipasi dalam perencanaan melalui Musrenbang, rapat RT/RW, dan survei aspirasi dengan tingkat keterlibatan sebesar 65-80%; partisipasi dalam pelaksanaan melalui gotong royong, kontribusi material, dana, dan keahlian dengan tingkat keterlibatan 60-70%; partisipasi dalam pemanfaatan dengan tingkat pemanfaatan infrastruktur mencapai 85-90%; serta partisipasi dalam evaluasi melalui rapat evaluasi dan mekanisme pengaduan dengan tingkat partisipasi sebesar 55%. Tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, kondisi ekonomi, usia, dan motivasi masyarakat, serta faktor eksternal seperti kepemimpinan, komunikasi, transparansi, dan tradisi gotong royong. Secara keseluruhan, efektivitas partisipasi masyarakat di Kelurahan Jogosari tergolong cukup tinggi, dengan keberhasilan program mencapai 85%, tingkat keberlanjutan yang baik, dan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 78%.

#### Saran

##### a. Saran untuk Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi melalui mekanisme yang lebih menarik dan mudah diakses, mengembangkan sistem komunikasi digital agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, memberikan pelatihan mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program pembangunan infrastruktur.



**b. Saran untuk Masyarakat**

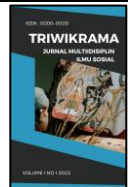
Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pembangunan infrastruktur, mengembangkan kapasitas diri melalui pelatihan dan pendidikan, memperkuat organisasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas partisipasi, serta memelihara tradisi gotong royong sebagai modal sosial dalam pembangunan.

**c. Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengukur tingkat partisipasi secara lebih akurat, melakukan perbandingan dengan Kelurahan lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, menganalisis dampak ekonomi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, serta mengkaji peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

**5. DAFTAR PUSTAKA**

- Ang, J. S., Cole, R. A., & Lin, J. W. (2000). Agency cost and ownership structures. *The Journal of Finance*, 55(1), 81-106.
- Adams, J. (1996). Principals and agents, colonialists and company men: The decay of colonial control in the Dutch East Indies. *American Sociological Review*, 61(1), 12-28.
- Alchian, A., & Demsetz, H. (1972). Production, information costs, and economic organization. *The American Economic Review*, 62(5), 777-795.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development, 8(3), 213-235.
- Firmansyah. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 670.
- Grigg, N. S. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*. New York: John
- Kodrianingsih, W. L. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 6, Nomor 7*, 5384-5391.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mudjiyanto, B. (2018). *Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 22(2), 151-166.
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. 8(2), 21-31.
- Paselle, E. (2013). Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma, Vol. 2 No.1*, 10-25.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.



Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta: Sekretariat Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Sosiohumaniora*, 4(2), 55-65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v4i2.17458>

Riyanto, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2*, 374-388.

Rodsyada, R. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sari, D. P. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45-62.

Suryono, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 8(1), 23-38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Widodo, S. (2020). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 112-128.

Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.